



**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan .....

2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2 ....

4



Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:
  - a. UPT pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali;
  - b. Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - c. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan pada Dinas Pertanian.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Perhubungan;
  - d. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;
  - e. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
  - f. Dinas Lingkungan Hidup;
  - g. Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
  - h. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Selo;
  - b. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Cepogo;
  - c. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Musuk;
  - d. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Ampel;
  - e. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Boyolali;
  - f. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Mojosongo;
  - g. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Teras;
  - h. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Sawit;
  - i. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Banyudono;
  - j. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Sambu;
  - k. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Simo;
  - l. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Ngemplak;
  - m. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Nogosari;
  - n. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Andong;
  - o. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego;
  - p. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Karanggede;
  - q. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Wonosegoro;
  - r. UPT Pendidikan ....

- r. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Kemusu; dan
- s. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Juwangi.

#### Pasal 4

UPT pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. UPT Puskesmas, yang terdiri dari:
  - 1. UPT Puskesmas Selo;
  - 2. UPT Puskesmas Cepogo;
  - 3. UPT Puskesmas Musuk I;
  - 4. UPT Puskesmas Musuk II;
  - 5. UPT Puskesmas Ampel I;
  - 6. UPT Puskesmas Ampel II;
  - 7. UPT Puskesmas Boyolali I;
  - 8. UPT Puskesmas Boyolali II;
  - 9. UPT Puskesmas Mojosongo;
  - 10. UPT Puskesmas Teras;
  - 11. UPT Puskesmas Sawit;
  - 12. UPT Puskesmas Banyudono I;
  - 13. UPT Puskesmas Banyudono II;
  - 14. UPT Puskesmas Sambu;
  - 15. UPT Puskesmas Simo
  - 16. UPT Puskesmas Ngemplak;
  - 17. UPT Puskesmas Nogosari;
  - 18. UPT Puskesmas Andong;
  - 19. UPT Puskesmas Klego I;
  - 20. UPT Puskesmas Klego II;
  - 21. UPT Puskesmas Karanggede;
  - 22. UPT Puskesmas Wonosegoro I;
  - 23. UPT Puskesmas Wonosegoro II;
  - 24. UPT Puskesmas Kemusu I;
  - 25. UPT Puskesmas Kemusu II; dan
  - 26. UPT Puskesmas Juwangi.
- b. UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A.



Pasal 5

Pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibentuk UPT Sarana dan Prasarana Perhubungan kelas A.

Pasal 6

Pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dibentuk UPT Balai Latihan Kerja kelas A.

Pasal 7

Pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dibentuk UPT Pengelola Obyek Wisata kelas A.

Pasal 8

Pada pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dibentuk:

- a. UPT Kebun Raya Indrokilo kelas A; dan
- b. UPT Pengelolaan Sampah kelas A.

Pasal 9

(1) Pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dibentuk UPT sebagai berikut:

- a. UPT Rumah Potong Hewan kelas A;
- b. UPT Balai Benih Ikan kelas A; dan
- c. UPT Pusat Kesehatan Hewan.

(2) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. UPT Pusat Kesehatan Hewan kelas B di Kecamatan Ampel yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Selo;
- b. UPT Pusat Kesehatan Hewan kelas B di Kecamatan Mojosongo yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Boyolali, Kecamatan Musuk, Kecamatan Mojosongo, dan Kecamatan Teras;
- c. UPT Pusat Kesehatan Hewan kelas B di Kecamatan Simo yang mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Simo, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Klego, dan Kecamatan Andong;
- d. UPT Pusat Kesehatan Hewan kelas B di Kecamatan Ngemplak yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sawit, Kecamatan Sambu, dan Kecamatan Ngemplak;

e. UPT Pusat ....

- e. UPT Pusat Kesehatan Hewan kelas B di Kecamatan Karanggede yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Kemusu, dan Kecamatan Juwangi.

#### Pasal 10

Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dibentuk UPT sebagai berikut:

- a. UPT Pasar Hewan kelas B yang mempunyai wilayah kerja Pasar Hewan Sunggingan, Pasar Hewan Ampel, Pasar Hewan Purworejo, Pasar Hewan Karangjati, dan Pasar Hewan Karanggede;
- b. UPT Pasar Umum kelas A terdiri dari:
  - 1. UPT Pasar Umum Ampel yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar umum Ampel dan Pasar Umum Kembang;
  - 2. UPT Pasar Umum Boyolali yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Boyolali, Pasar Umum Sunggingan, Pasar Unggas dan Klitikan Ngebong, Pasar Repelita, Pasar kayu Sidodadi, Pasar Umum mojosongo, dan Pasar umum Tambak;
  - 3. UPT Pasar Umum Cepogo yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Cepogo, Pasar Sayur Cepogo, Pasar Umum Selo, dan Pasar Umum Drajidan;
  - 4. UPT Pasar Umum Karanggede yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Karanggede, Pasar Umum Klego, Pasar Umum Wonosegoro, Pasar Umum Juwangi, Pasar Umum Repaking, Pasar Umum Mongkrong, Pasar Umum Keongowi, Pasar Umum Kacangan, Pasar Umum Batangan, Pasar Umum Ngegot, Pasar Umum Kemusu, Pasar Umum Kunti dan Pasar Umum Putat;
  - 5. UPT Pasar Umum Simo yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Simo, Pasar Umum Sambi, Pasar Umum Trantang, Pasar Umum Walen, Pasar Umum Nogosari, Pasar Umum Kebonagung, Pasar Umum Ketitang, Pasar Umum Pengging, Pasar Umum Pundung, Pasar Umum Ngancar, Pasar Umum Bangak, Pasar Umum Teras, dan Pasar Umum Sonorejo; dan
- c. UPT Metrologi Legal kelas A.

#### Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan Formal, Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri;

b. Satuan ....



- b. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  - c. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap; dan
  - d. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Pada Dinas Pertanian dibentuk:

- a. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten;
- b. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan meliputi:
  - 1. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Selo;
  - 2. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cepogo;
  - 3. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Musuk;
  - 4. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ampel;
  - 5. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Boyolali;
  - 6. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mojosongo;
  - 7. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Teras;
  - 8. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sawit;
  - 9. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banyudono;
  - 10. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sambu;
  - 11. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Simo;
  - 12. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngemplak;
  - 13. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Nogosari;
  - 14. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Andong;
  - 15. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Klego;
  - 16. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karanggede;
  - 17. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Wonosegoro;
  - 18. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kemusu; dan
  - 19. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Juwangi.

### BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Bagian Kesatu UPT Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

##### Pasal 13

UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Bagian Kedua UPT Pada Dinas Kesehatan

##### Pasal 14

UPT pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

##### Pasal 15

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di wilayah kerjanya.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang upaya pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

#### Bagian Ketiga UPT Pada Dinas Perhubungan

Pasal 16 ....

4



#### Pasal 16

- (1) UPT Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang sarana dan prasarana perhubungan.

#### Bagian Keempat

##### UPT Pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja

#### Pasal 17

- (1) UPT pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja.
- (2) UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan kerja industri, tata niaga, pertanian dan aneka kejuruan.

#### Bagian Kelima

##### UPT Pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

#### Pasal 18

- (1) UPT pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata.
- (2) UPT Pengelola Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan obyek wisata.



Bagian Keenam  
UPT Pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) UPT pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT Kebun Raya Indrokilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang konservasi tumbuhan secara Ex Situ yang berperan dalam rangka mengurangi laju degradasi keanekaragaman tumbuhan di wilayah kerjanya.
- (3) UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.

Bagian Ketujuh  
UPT Pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 20

- (1) UPT pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pemotongan hewan.
- (3) UPT Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pembenihan ikan.
- (4) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedelapan ....



### Bagian Kedelapan

#### UPT Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

##### Pasal 21

- (1) UPT pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) UPT Pasar Hewan dan Pasar Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan satu atau lebih pasar daerah di wilayah kerjanya.
- (3) UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kemeterologian.

### Bagian Kesembilan

#### Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

##### Pasal 22

Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

##### Pasal 23

- (1) Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Dasar Negeri tempat kerjanya.
- (2) Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap tempat kerjanya.

Pasal 24 ....



Pasal 24

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan non formal yang meliputi:
  - a. pemberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan anak usia dini;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan keaksaraan;
  - f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
  - g. pendidikan kesetaraan; dan
  - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang dijabat oleh Pamong Belajar dengan jabatan fungsional.
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. pembentuk rombongan belajar program Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. penyelenggara pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - c. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
  - d. penyelenggara evaluasi pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - e. penyelenggaraan program percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - f. pembimbing program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - g. penyelenggara desa binaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - i. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
  - j. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
  - k. pelaksanaan ....



- k. pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (4) Selain memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), setelah memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar berwenang:
  - a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program Pendidikan Non Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat uji kompetensi bagi peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten dan Balai Penyuluhan  
Pertanian Kecamatan Pada Dinas Pertanian

#### Pasal 25

- (1) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan unit kerja non struktural, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.
- (2) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan dan mensinkronisasi kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
  - b. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petanian;
  - c. menyusun dan menyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian; dan
  - d. mengelola satuan administrasi pangkal Penyuluh Pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- (3) BPP Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan unit kerja non struktural Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi UPT kelas A terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT kelas B terdiri dari:
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama satu atap terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V JABATAN

### Pasal 27

- (1) Kepala UPT kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPT kelas B merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

(4) Kepala ....



- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT kelas A, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekolah Menengan Pertama dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekolah Menengan Pertama satu Atap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri dijabat oleh pejabat fungsional guru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dijabat oleh pejabat fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dijabat oleh pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dijabat oleh pejabat yang berlatar belakang pendidikan kesehatan hewan.
- (9) Kepala UPT Puskesmas dan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (10) Koordinator BPP Kecamatan dijabat oleh pejabat fungsional penyuluh.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

- (1) Pejabat UPT yang ada saat ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengangkatan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Unit kerja berbentuk BPP Kecamatan dapat menggunakan sumber daya manusia dan aset yang dimiliki pada saat berbentuk UPT.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 39) dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30 ....

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI BOYOLALI,



LENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI  
Asisten Administrasi Umum,



SUGIYANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR : TAHUN 2018  
 TANGGAL : 2018  
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
 DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP  
 DI KABUPATEN BOYOLALI

NO	NAMA SEKOLAH
1	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Selo
2	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Selo
3	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cepogo
4	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cepogo
5	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ampel
6	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ampel
7	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ampel
8	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Musuk
9	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Musuk
10	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Boyolali
11	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Boyolali
12	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Boyolali
13	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Boyolali
14	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Boyolali
15	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Boyolali
16	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mojosongo
17	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mojosongo
18	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mojosongo
19	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Mojosongo
20	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Teras
21	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Teras

NO	NAMA SEKOLAH
22	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teras
23	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sawit
24	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sawit
25	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sawit
26	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banyudono
27	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banyudono
28	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngemplak
29	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngemplak
30	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nogosari
31	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nogosari
32	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambi
33	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sambi
34	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Simo
35	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Simo
36	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Simo
37	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klego
38	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Klego
39	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggede
40	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggede
41	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Andong
42	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Andong
43	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kemusu
44	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kemusu
45	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonosegoro
46	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonosegoro
47	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Juwangi
48	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Juwangi
49	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cepogo Satu Atap

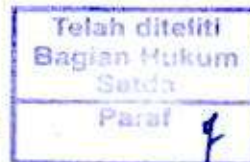


NO	NAMA SEKOLAH
50	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Ampel Satu Atap
51	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Musuk Satu Atap
52	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Juwangi Satu Atap

BUPATI BOYOLALI



SENODRO



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR : 26 TAHUN 2018  
 TANGGAL: 2 Agustus 2018  
 TENTANG: PEMBENTUKAN UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
 DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI  
 DI KABUPATEN BOYOLALI

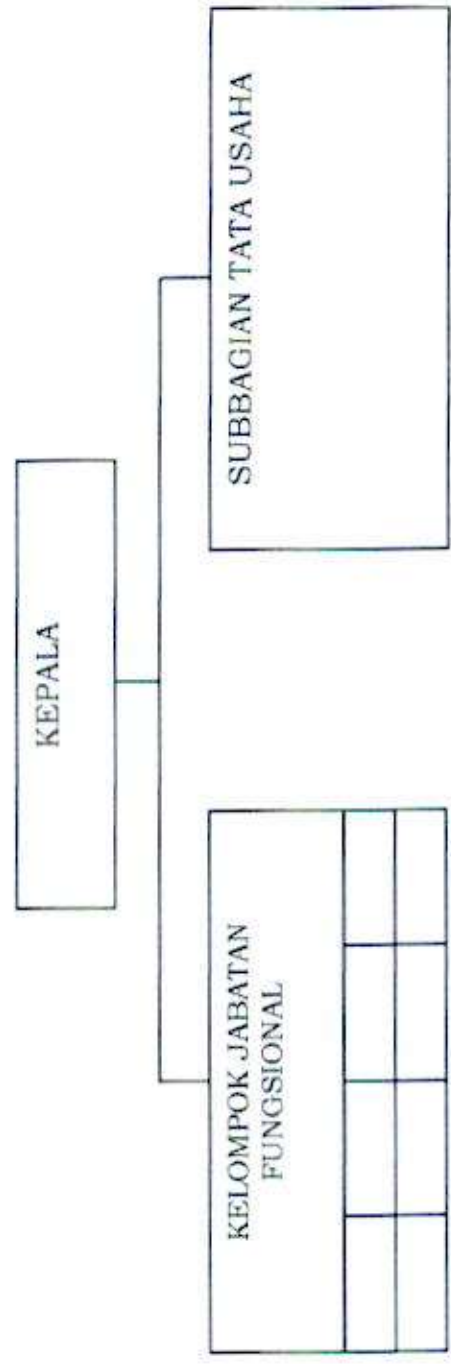
NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
1	SD NEGERI GLADAGSARI	Ampel
2	SD NEGERI 1 AMPEL	Ampel
3	SD NEGERI 2 AMPEL	Ampel
4	SD NEGERI 3 AMPEL	Ampel
5	SD NEGERI 1 KALIGENTONG	Ampel
6	SD NEGERI 1 URUTSEWU	Ampel
7	SD NEGERI 1 TANDUK	Ampel
8	SD NEGERI 1 SEBOTO	Ampel
9	SD NEGERI MRAWUN	Ampel
10	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	Ampel
11	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	Ampel
12	SD NEGERI BANYUANYAR	Ampel
13	SD NEGERI WANGAN	Ampel
14	SD NEGERI 1 NGARGOSARI	Ampel
15	SD NEGERI 2 NGARGOSARI	Ampel
16	SD NEGERI 1 NGADIROJO	Ampel
17	SD NEGERI NGARGOLOKA	Ampel
18	SD NEGERI 1 JLAREM	Ampel
19	SD NEGERI RINGINSARI	Ampel
20	SD NEGERI 2 KEMBANG	Ampel
21	SD NEGERI SAMPETAN	Ampel
22	SD NEGERI 1 KEMBANG	Ampel
23	SD NEGERI 1 CANDISARI	Ampel
24	SD NEGERI 1 NGAGRONG	Ampel
25	SD NEGERI 1 NGENDEN	Ampel
26	SD NEGERI 2 NGENDEN	Ampel
27	SD NEGERI 1 GONDANGSLAMET	Ampel
28	SD NEGERI NGAMPON	Ampel
29	SD NEGERI 1 SELODOKO	Ampel
30	SD NEGERI 2 URUTSEWU	Ampel
31	SD NEGERI 2 SELODOKO	Ampel
32	SD NEGERI 2 TANDUK	Ampel
33	SD NEGERI 2 SEBOTO	Ampel
34	SD NEGERI 2 NGAGRONG	Ampel
35	SD NEGERI 3 URUTSEWU	Ampel
36	SD NEGERI CANDI	Ampel
37	SD NEGERI 3 NGARGOSARI	Ampel
38	SD NEGERI 2 NGADIROJO	Ampel
39	SD NEGERI 2 KALIGENTONG	Ampel



NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
40	SD NEGERI 2 GONDANGSLAMET	Ampel
41	SD NEGERI 2 CANDISARI	Ampel
42	SD NEGERI 2 JLAREM	Ampel
43	SD NEGERI 1 MOJO	Andong
44	SD NEGERI PAKANG	Andong
45	SD NEGERI 1 SEMAWUNG	Andong
46	SD NEGERI SEMPU	Andong
47	SD NEGERI 1 KUNTI	Andong
48	SD NEGERI 1 ANDONG	Andong
49	SD NEGERI BEJI	Andong
50	SD NEGERI 2 KACANGAN	Andong
51	SD NEGERI 1 KACANGAN	Andong
52	SD NEGERI GEJUGAN	Andong
53	SD NEGERI 1 PAKEL	Andong
54	SD NEGERI KARANGASEM	Andong
55	SD NEGERI MUNGUR	Andong
56	SD NEGERI 3 KACANGAN	Andong
57	SD NEGERI 2 MOJO	Andong
58	SD NEGERI 1 SENGGRONG	Andong
59	SD NEGERI 1 NGOYOG	Andong
60	SD NEGERI BANYURIP	Andong
61	SD NEGERI SAWIT	Andong
62	SD NEGERI TEMPURAN	Andong
63	SD NEGERI NGADIREJO	Andong
64	SD NEGERI PRANGGONG	Andong
65	SD NEGERI 1 BANARAN	Andong
66	SD NEGERI TURUNAN	Andong
67	SD NEGERI 2 GONDANGRAWE	Andong
68	SD NEGERI 2 SENGGRONG	Andong
69	SD NEGERI 2 KADIPATEN	Andong
70	SD NEGERI 3 MOJO	Andong
71	SD NEGERI 2 BANARAN	Andong
72	SD NEGERI 2 ANDONG	Andong
73	SD NEGERI 2 NGOYOG	Andong
74	SD NEGERI PELEMREJO	Andong
75	SD NEGERI 2 KEDUNGOWO	Andong
76	SD NEGERI 2 BANYUDONO	Banyudono
77	SD NEGERI 3 BANYUDONO	Banyudono
78	SD NEGERI CANGKRINGAN	Banyudono
79	SD NEGERI 1 DUKUH	Banyudono
80	SD NEGERI 2 DUKUH	Banyudono
81	SD NEGERI 1 JEMBUNGAN	Banyudono
82	SD NEGERI 2 JEMBUNGAN	Banyudono
83	SD NEGERI 3 JEMBUNGAN	Banyudono
84	SD NEGERI 1 BATAN	Banyudono
85	SD NEGERI 2 BATAN	Banyudono
86	SD NEGERI 1 DENGUNGAN	Banyudono
87	SD NEGERI 2 DENGUNGAN	Banyudono
88	SD NEGERI 1 TRAYU	Banyudono
89	SD NEGERI 2 TRAYU	Banyudono
90	SD NEGERI 1 TANJUNGSARI	Banyudono

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR     TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PADA DINAS DAERAH KABUPATEN  
 BOYOLALI

BAGAN STRUKTUR UPT PUSKESMAS



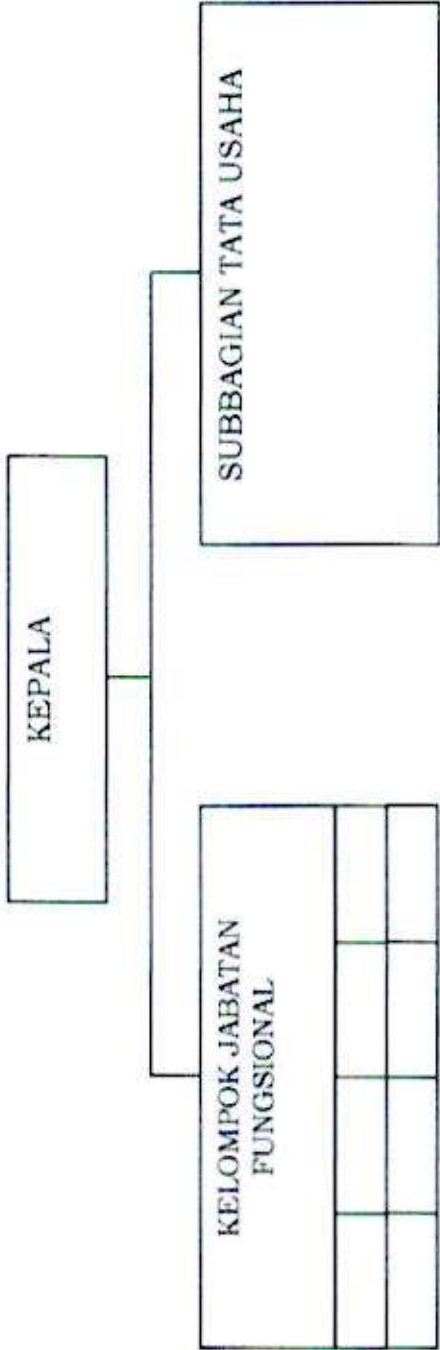
BUPATI BOYOLALI, *[Signature]*  
*[Signature]*  
 SENO SAMODRO

Telah diteliti Bagian Hukum Satda	
Paraf	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR    TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI

BAGAN STRUKTUR UPT PENDIDIKAN DASAR DAN LUAR SEKOLAH



BUPATI BOYOLALI 

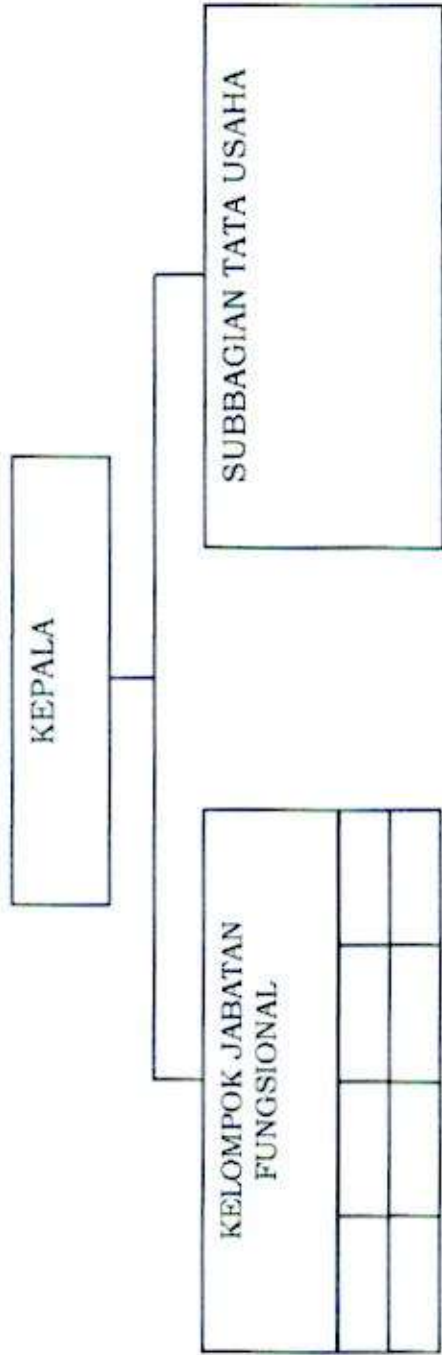
SENO SAMODRO

Teknis Tata Usaha Bagian Hukum S. S. S.	Perak
---	-------



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PADA DINAS DAERAH KABUPATEN  
 BOYOLALI

BAGAN STRUKTUR SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN  
 SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP



BUPATI BOYOLALI, *[Signature]*

LENO SAMODRO

Telah diteliti Bagian Hukum Setda	
Paraf	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*



NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
91	SD NEGERI 1 KETAON	Banyudono
92	SD NEGERI 2 KETAON	Banyudono
93	SD NEGERI 3 KETAON	Banyudono
94	SD NEGERI 1 KUWIRAN	Banyudono
95	SD NEGERI 2 KUWIRAN	Banyudono
96	SD NEGERI 1 BANGAK	Banyudono
97	SD NEGERI 1 BENDAN	Banyudono
98	SD NEGERI 2 BENDAN	Banyudono
99	SD NEGERI 1 NGARU-ARU	Banyudono
100	SD NEGERI 2 NGARU-ARU	Banyudono
101	SD NEGERI 1 JIPANGAN	Banyudono
102	SD NEGERI 2 JIPANGAN	Banyudono
103	SD NEGERI 1 SAMBON	Banyudono
104	SD NEGERI 2 SAMBON	Banyudono
105	SD NEGERI 1 BOYOLALI	Boyolali
106	SD NEGERI 3 BOYOLALI	Boyolali
107	SD NEGERI 4 BOYOLALI	Boyolali
108	SD NEGERI 5 BOYOLALI	Boyolali
109	SD NEGERI 9 BOYOLALI	Boyolali
110	SD NEGERI 7 BOYOLALI	Boyolali
111	SD NEGERI 8 BOYOLALI	Boyolali
112	SD NEGERI PULISEN	Boyolali
113	SD NEGERI 1 SISWODIPURAN	Boyolali
114	SD NEGERI 1 WINONG	Boyolali
115	SD NEGERI 2 WINONG	Boyolali
116	SD NEGERI 1 PENGGUNG	Boyolali
117	SD NEGERI 2 PENGGUNG	Boyolali
118	SD NEGERI 1 KARANGGENENG	Boyolali
119	SD NEGERI 1 BANARAN	Boyolali
120	SD NEGERI 1 KIRINGAN	Boyolali
121	SD NEGERI 2 KIRINGAN	Boyolali
122	SD NEGERI 1 MUDAL	Boyolali
123	SD NEGERI 2 MUDAL	Boyolali
124	SD NEGERI 3 MUDAL	Boyolali
125	SD NEGERI 1 KEBONBIMO	Boyolali
126	SD NEGERI 3 PENGGUNG	Boyolali
127	SD NEGERI 3 KEBONBIMO	Boyolali
128	SD NEGERI 4 KIRINGAN	Boyolali
129	SD NEGERI 3 KIRINGAN	Boyolali
130	SD NEGERI SINGKIL	Boyolali
131	SD NEGERI SURODADI	Boyolali
132	SD NEGERI SUSILOHARJO	Boyolali
133	SD NEGERI 2 KARANGGENENG	Boyolali
134	SD NEGERI REJOSARI	Boyolali
135	SD NEGERI MULYOSARI	Boyolali
136	SD NEGERI KRIKIL	Boyolali
137	SD NEGERI 3 WINONG	Boyolali
138	SD NEGERI 1 CEPOGO	Cepogo
139	SD NEGERI 2 CEPOGO	Cepogo
140	SD NEGERI 1 PARAS	Cepogo
141	SD NEGERI 2 PARAS	Cepogo



NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
142	SD NEGERI 1 TUMANG	Cepogo
143	SD NEGERI 2 TUMANG	Cepogo
144	SD NEGERI 1 GUBUG	Cepogo
145	SD NEGERI KARANGTALUN	Cepogo
146	SD NEGERI 1 KEMBANGKUNING	Cepogo
147	SD NEGERI SIDOREJO	Cepogo
148	SD NEGERI 1 GENTING	Cepogo
149	SD NEGERI 1 WONODOYO	Cepogo
150	SD NEGERI 1 GEDANGAN	Cepogo
151	SD NEGERI 1 JOMBONG	Cepogo
152	SD NEGERI 1 SUMBUNG	Cepogo
153	SD NEGERI 1 JELOK	Cepogo
154	SD NEGERI RANDU	Cepogo
155	SD NEGERI BAKULAN	Cepogo
156	SD NEGERI 1 CANDIGATAK	Cepogo
157	SD NEGERI 1 CABEANKUNTI	Cepogo
158	SD NEGERI SUKABUMI	Cepogo
159	SD NEGERI 3 PARAS	Cepogo
160	SD NEGERI 2 JELOK	Cepogo
161	SD NEGERI 2 CANDIGATAK	Cepogo
162	SD NEGERI 2 GEDANGAN	Cepogo
163	SD NEGERI 2 WONODOYO	Cepogo
164	SD NEGERI MLIWIS	Cepogo
165	SD NEGERI 2 JOMBONG	Cepogo
166	SD NEGERI 2 SUMBUNG	Cepogo
167	SD NEGERI 3 TUMANG	Cepogo
168	SD NEGERI 2 KEMBANGKUNING	Cepogo
169	SD NEGERI 2 GENTING	Cepogo
170	SD NEGERI 2 CABEANKUNTI	Cepogo
171	SD NEGERI 4 TUMANG	Cepogo
172	SD NEGERI 1 JUWANGI	Juwangi
173	SD NEGERI 1 NGLESES	Juwangi
174	SD NEGERI 2 JERUKAN	Juwangi
175	SD NEGERI 2 JUWANGI	Juwangi
176	SD NEGERI 2 KROBOKAN	Juwangi
177	SD NEGERI 2 NGLESES	Juwangi
178	SD NEGERI 3 KALIMATI	Juwangi
179	SD NEGERI 3 KAYEN	Juwangi
180	SD NEGERI 4 KAYEN	Juwangi
181	SD NEGERI 5 JUWANGI	Juwangi
182	SD NEGERI CERME	Juwangi
183	SD NEGERI 1 PILANGREJO	Juwangi
184	SD NEGERI 3 JUWANGI	Juwangi
185	SD NEGERI 2 KAYEN	Juwangi
186	SD NEGERI 1 KROBOKAN	Juwangi
187	SD NEGERI 3 KROBOKAN	Juwangi
188	SD NEGERI 1 SAMBENG	Juwangi
189	SD NEGERI 1 JERUKAN	Juwangi
190	SD NEGERI 1 KALIMATI	Juwangi
191	SD NEGERI 1 KAYEN	Juwangi
192	SD NEGERI 1 NGAREN	Juwangi



NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
193	SD NEGERI 2 KALIMATI	Juwangi
194	SD NEGERI 2 PILANGREJO	Juwangi
195	SD NEGERI 2 SAMBENG	Juwangi
196	SD NEGERI KEBONAN	Karanggede
197	SD NEGERI TEGALSARI	Karanggede
198	SD NEGERI MOJOSARI	Karanggede
199	SD NEGERI 1 PENGKOL	Karanggede
200	SD NEGERI SEMPULUR	Karanggede
201	SD NEGERI KLUMPIT	Karanggede
202	SD NEGERI GROGOLAN	Karanggede
203	SD NEGERI 1 SENDANG	Karanggede
204	SD NEGERI 1 SRANTEN	Karanggede
205	SD NEGERI DOLOGAN	Karanggede
206	SD NEGERI KLIMAS	Karanggede
207	SD NEGERI PINGGIR	Karanggede
208	SD NEGERI BANGKOK	Karanggede
209	SD NEGERI 2 KARANGKEPOH	Karanggede
210	SD NEGERI 2 SRANTEN	Karanggede
211	SD NEGERI 1 MANYARAN	Karanggede
212	SD NEGERI 1 BANTENGAN	Karanggede
213	SD NEGERI 1 KLARI	Karanggede
214	SD NEGERI 2 MANYARAN	Karanggede
215	SD NEGERI 2 SENDANG	Karanggede
216	SD NEGERI 2 PENGKOL	Karanggede
217	SD NEGERI 2 KLARI	Karanggede
218	SD NEGERI 2 BANTENGAN	Karanggede
219	SD NEGERI 1 KEMUSU	Kemusu
220	SD NEGERI 1 GENENGSARI	Kemusu
221	SD NEGERI 2 GENENGSARI	Kemusu
222	SD NEGERI 1 KLEWOR	Kemusu
223	SD NEGERI 1 BAWU	Kemusu
224	SD NEGERI 1 KENDEL	Kemusu
225	SD NEGERI 1 KAUMAN	Kemusu
226	SD NEGERI 1 GUWO	Kemusu
227	SD NEGERI 1 LEMAHIRENG	Kemusu
228	SD NEGERI 3 NGLANJI	Kemusu
229	SD NEGERI 1 WONOHARJO	Kemusu
230	SD NEGERI 1 NGRAKUM	Kemusu
231	SD NEGERI 1 WATUGEDE	Kemusu
232	SD NEGERI 2 KLEWOR	Kemusu
233	SD NEGERI 2 BAWU	Kemusu
234	SD NEGERI 3 GENENGSARI	Kemusu
235	SD NEGERI 2 KAUMAN	Kemusu
236	SD NEGERI 2 GUWO	Kemusu
237	SD NEGERI 3 KEMUSU	Kemusu
238	SD NEGERI 2 SARIMULYO	Kemusu
239	SD NEGERI 4 WONOHARJO	Kemusu
240	SD NEGERI 2 WATUGEDE	Kemusu
241	SD NEGERI 3 BAWU	Kemusu
242	SD NEGERI KEDUNG MULYO	Kemusu
243	SD NEGERI KEDUNGREJO	Kemusu



NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
244	SD NEGERI 1 KLEGO	Klego
245	SD NEGERI 3 KLEGO	Klego
246	SD NEGERI 1 BADE	Klego
247	SD NEGERI 2 BADE	Klego
248	SD NEGERI 1 SANGGE	Klego
249	SD NEGERI 2 SANGGE	Klego
250	SD NEGERI 1 TANJUNG	Klego
251	SD NEGERI 2 TANJUNG	Klego
252	SD NEGERI 3 TANJUNG	Klego
253	SD NEGERI 1 GONDANGLEGI	Klego
254	SD NEGERI 2 GONDANGLEGI	Klego
255	SD NEGERI 1 SUMBERAGUNG	Klego
256	SD NEGERI 2 SUMBERAGUNG	Klego
257	SD NEGERI 3 SUMBERAGUNG	Klego
258	SD NEGERI KARANGMOJO	Klego
259	SD NEGERI 1 SENDANGREJO	Klego
260	SD NEGERI 2 SENDANGREJO	Klego
261	SD NEGERI 1 JATEN	Klego
262	SD NEGERI 1 BLUMBANG	Klego
263	SD NEGERI 1 KARANGGATAK	Klego
264	SD NEGERI 1 KALANGAN	Klego
265	SD NEGERI 2 KALANGAN	Klego
266	SD NEGERI 1 BANYUURIP	Klego
267	SD NEGERI 2 BANYUURIP	Klego
268	SD NEGERI 1 MOJOSONGO	Mojosongo
269	SD NEGERI 1 TAMBAK	Mojosongo
270	SD NEGERI 1 JURUG	Mojosongo
271	SD NEGERI 1 KEMIRI	Mojosongo
272	SD NEGERI 2 TAMBAK	Mojosongo
273	SD NEGERI 1 SINGOSARI	Mojosongo
274	SD NEGERI 1 KARANGNONGKO	Mojosongo
275	SD NEGERI 1 METUK	Mojosongo
276	SD NEGERI 2 METUK	Mojosongo
277	SD NEGERI 2 KEMIRI	Mojosongo
278	SD NEGERI 1 MADU	Mojosongo
279	SD NEGERI 2 SINGOSARI	Mojosongo
280	SD NEGERI 1 MANGGIS	Mojosongo
281	SD NEGERI 2 KRAGILAN	Mojosongo
282	SD NEGERI 1 BUTUH	Mojosongo
283	SD NEGERI 2 JURUG	Mojosongo
284	SD NEGERI NGADIREJO	Mojosongo
285	SD NEGERI 1 KEBAKAN	Mojosongo
286	SD NEGERI 2 BRAJAN	Mojosongo
287	SD NEGERI 1 DLINGO	Mojosongo
288	SD NEGERI KRAJAN	Mojosongo
289	SD NEGERI 2 BUTUH	Mojosongo
290	SD NEGERI 2 MANGGIS	Mojosongo
291	SD NEGERI 3 SINGOSARI	Mojosongo
292	SD NEGERI 2 DLINGO	Mojosongo
293	SD NEGERI JATEN	Mojosongo
294	SD NEGERI 3 BRAJAN	Mojosongo



NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
295	SD NEGERI 3 KEMIRI	Mojosongo
296	SD NEGERI MASAHAH	Mojosongo
297	SD NEGERI 3 TAMBAK	Mojosongo
298	SD NEGERI 2 KARANGNONGKO	Mojosongo
299	SD NEGERI 2 MADU	Mojosongo
300	SD NEGERI 4 TAMBAK	Mojosongo
301	SD NEGERI 1 MUSUK	Musuk
302	SD NEGERI 2 MUSUK	Musuk
303	SD NEGERI KEBON GULO	Musuk
304	SD NEGERI PUSPORENGGO	Musuk
305	SD NEGERI 1 SUKORAME	Musuk
306	SD NEGERI 1 KEMBANGSARI	Musuk
307	SD NEGERI 1 RINGINLARIK	Musuk
308	SD NEGERI 2 RINGINLARIK	Musuk
309	SD NEGERI DRAJIDAN	Musuk
310	SD NEGERI 1 SUKOREJO	Musuk
311	SD NEGERI 1 CLUNTANG	Musuk
312	SD NEGERI 1 JEMOWO	Musuk
313	SD NEGERI 2 JEMOWO	Musuk
314	SD NEGERI 1 SUMUR	Musuk
315	SD NEGERI 2 SUMUR	Musuk
316	SD NEGERI 1 SANGUB	Musuk
317	SD NEGERI 1 LANJARAN	Musuk
318	SD NEGERI 2 LANJARAN	Musuk
319	SD NEGERI 1 MRIYAN	Musuk
320	SD NEGERI DRAGAN LAMPAR	Musuk
321	SD NEGERI 1 DRAGAN	Musuk
322	SD NEGERI 1 KARANGANYAR	Musuk
323	SD NEGERI 1 KEPOSONG	Musuk
324	SD NEGERI PAGERJURANG	Musuk
325	SD NEGERI 1 KARANGKENDAL	Musuk
326	SD NEGERI 2 KARANGANYAR	Musuk
327	SD NEGERI 2 KEPOSONG	Musuk
328	SD NEGERI 1 SRUNI	Musuk
329	SD NEGERI 2 KEMBANGSARI	Musuk
330	SD NEGERI 2 SUKORAME	Musuk
331	SD NEGERI 1 LAMPAR	Musuk
332	SD NEGERI 4 JEMOWO	Musuk
333	SD NEGERI 2 KARANGKENDAL	Musuk
334	SD NEGERI 3 MUSUK	Musuk
335	SD NEGERI 3 KEMBANGSARI	Musuk
336	SD NEGERI 2 MUSUK	Musuk
337	SD NEGERI 2 PUSPORENGGO	Musuk
338	SD NEGERI 3 SUKOREJO	Musuk
339	SD NEGERI 2 DRAGAN	Musuk
340	SD NEGERI 2 SRUNI	Musuk
341	SD NEGERI 2 CLUNTANG	Musuk
342	SD NEGERI 2 LAMPAR	Musuk
343	SD NEGERI 3 SANGUB	Musuk
344	SD NEGERI 5 JEMOWO	Musuk
345	SD NEGERI 2 MRIYAN	Musuk



NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
346	SD NEGERI 1 SAWAHAN	Ngemplak
347	SD NEGERI 1 NGESREP	Ngemplak
348	SD NEGERI 1 KISMOYOSO	Ngemplak
349	SD NEGERI 1 SINDON	Ngemplak
350	SD NEGERI 2 SAWAHAN	Ngemplak
351	SD NEGERI 1 DIBAL	Ngemplak
352	SD NEGERI 1 NGARGOREJO	Ngemplak
353	SD NEGERI 1 GIRIROTO	Ngemplak
354	SD NEGERI 1 DONOHUDAN	Ngemplak
355	SD NEGERI 1 PANDEAN	Ngemplak
356	SD NEGERI 2 SINDON	Ngemplak
357	SD NEGERI 1 SOBOKERTO	Ngemplak
358	SD NEGERI 1 GAGAKSIPAT	Ngemplak
359	SD NEGERI 1 MANGGUNG	Ngemplak
360	SD NEGERI 2 NGARGOREJO	Ngemplak
361	SD NEGERI 2 KISMOYOSO	Ngemplak
362	SD NEGERI 2 GIRIROTO	Ngemplak
363	SD NEGERI 2 MANGGUNG	Ngemplak
364	SD NEGERI 2 GAGAKSIPAT	Ngemplak
365	SD NEGERI 3 SAWAHAN	Ngemplak
366	SD NEGERI 2 SOBOKERTO	Ngemplak
367	SD NEGERI 3 SOBOKERTO	Ngemplak
368	SD NEGERI 2 PANDEAN	Ngemplak
369	SD NEGERI 4 SAWAHAN	Ngemplak
370	SD NEGERI 2 DONOHUDAN	Ngemplak
371	SD NEGERI 3 PANDEAN	Ngemplak
372	SD NEGERI 2 NGESREP	Ngemplak
373	SD NEGERI 3 KISMOYOSO	Ngemplak
374	SD NEGERI 3 GAGAKSIPAT	Ngemplak
375	SD NEGERI 2 DIBAL	Ngemplak
376	SD NEGERI 3 DONOHUDAN	Ngemplak
377	SD NEGERI 3 GIRIROTO	Ngemplak
378	SD NEGERI 3 MANGGUNG	Ngemplak
379	SD NEGERI 1 BENDO	Nogosari
380	SD NEGERI 1 TEGALGIRI	Nogosari
381	SD NEGERI 2 NOGOSARI	Nogosari
382	SD NEGERI 1 PULUTAN	Nogosari
383	SD NEGERI 1 KENTENG	Nogosari
384	SD NEGERI 1 POJOK	Nogosari
385	SD NEGERI 1 KEYONGAN	Nogosari
386	SD NEGERI JERON	Nogosari
387	SD NEGERI KETITANG	Nogosari
388	SD NEGERI TARUBAN	Nogosari
389	SD NEGERI 3 NOGOSARI	Nogosari
390	SD NEGERI MOJOREJO	Nogosari
391	SD NEGERI 2 BENDO	Nogosari
392	SD NEGERI 1 GULI	Nogosari
393	SD NEGERI 1 SEMBUNGAN	Nogosari
394	SD NEGERI 1 REMBUN	Nogosari
395	SD NEGERI BASERAN	Nogosari
396	SD NEGERI WERU	Nogosari



NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
397	SD NEGERI PURWOREJO	Nogosari
398	SD NEGERI 1 POTRONAYAN	Nogosari
399	SD NEGERI GONDANGREJO	Nogosari
400	SD NEGERI 2 TEGALGIRI	Nogosari
401	SD NEGERI 2 PULUTAN	Nogosari
402	SD NEGERI 2 KENTENG	Nogosari
403	SD NEGERI 3 PULUTAN	Nogosari
404	SD NEGERI 3 TEGALGIRI	Nogosari
405	SD NEGERI 2 SEMBUNGAN	Nogosari
406	SD NEGERI 2 GULI	Nogosari
407	SD NEGERI 1 TROSOBO	Sambi
408	SD NEGERI 1 BABADAN	Sambi
409	SD NEGERI 1 JAGOAN	Sambi
410	SD NEGERI 2 BABADAN	Sambi
411	SD NEGERI 3 BABADAN	Sambi
412	SD NEGERI 4 SAMBI	Sambi
413	SD NEGERI 3 CERMO	Sambi
414	SD NEGERI 1 SENTING	Sambi
415	SD NEGERI 1 KEPOH	Sambi
416	SD NEGERI 2 CANDEN	Sambi
417	SD NEGERI 1 CANDEN	Sambi
418	SD NEGERI 1 SAMBI	Sambi
419	SD NEGERI 1 GLINTANG	Sambi
420	SD NEGERI 1 NGLEMBU	Sambi
421	SD NEGERI 2 SENTING	Sambi
422	SD NEGERI 2 SAMBI	Sambi
423	SD NEGERI 2 GLINTANG	Sambi
424	SD NEGERI 1 JATISARI	Sambi
425	SD NEGERI 1 TEMPUSARI	Sambi
426	SD NEGERI NGAGLIK	Sambi
427	SD NEGERI CATUR	Sambi
428	SD NEGERI 2 TAWENGAN	Sambi
429	SD NEGERI 2 JAGOAN	Sambi
430	SD NEGERI 2 CERMO	Sambi
431	SD NEGERI 1 DEMANGAN	Sambi
432	SD NEGERI 2 TROSOBO	Sambi
433	SD NEGERI 2 JATISARI	Sambi
434	SD NEGERI WONOTORO	Sambi
435	SD NEGERI 1 TAWENGAN	Sambi
436	SD NEGERI 2 KEMASAN	Sawit
437	SD NEGERI 3 JENENGAN	Sawit
438	SD NEGERI 1 JENENGAN	Sawit
439	SD NEGERI 2 QUWOKAJEN	Sawit
440	SD NEGERI 1 GUWOKAJEN	Sawit
441	SD NEGERI 2 BENDOSARI	Sawit
442	SD NEGERI 1 BENDOSARI	Sawit
443	SD NEGERI 2 KATEGUHAN	Sawit
444	SD NEGERI 1 KATEGUHAN	Sawit
445	SD NEGERI 2 MANJUNG	Sawit
446	SD NEGERI 1 MANJUNG	Sawit
447	SD NEGERI 1 KEMASAN	Sawit



NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
448	SD NEGERI 2 KARANGDUREN	Sawit
449	SD NEGERI 1 KARANGDUREN	Sawit
450	SD NEGERI 2 JATIREJO	Sawit
451	SD NEGERI 1 JATIREJO	Sawit
452	SD NEGERI 2 CEPOKOSAWIT	Sawit
453	SD NEGERI 1 CEPOKOSAWIT	Sawit
454	SD NEGERI TEGALMUNCAR	Sawit
455	SD NEGERI MUNGUP	Sawit
456	SD NEGERI 1 TEGALREJO	Sawit
457	SD NEGERI KLABANG	Sawit
458	SD NEGERI 1 SELO	Selo
459	SD NEGERI 1 JERUK	Selo
460	SD NEGERI 2 SELO	Selo
461	SD NEGERI 1 TARUBATANG	Selo
462	SD NEGERI GUNUNGSARI	Selo
463	SD NEGERI 1 JRAKAH	Selo
464	SD NEGERI GEBYOG	Selo
465	SD NEGERI 1 SUROTELENG	Selo
466	SD NEGERI 1 TLOGOLELE	Selo
467	SD NEGERI 1 KLAKAH	Selo
468	SD NEGERI LENCOH	Selo
469	SD NEGERI 2 JRAKAH	Selo
470	SD NEGERI SEPANDAN	Selo
471	SD NEGERI SENDEN	Selo
472	SD NEGERI 2 JERUK	Selo
473	SD NEGERI 2 TARUBATANG	Selo
474	SD NEGERI 2 KLAKAH	Selo
475	SD NEGERI 2 SUROTELENG	Selo
476	SD NEGERI 2 TLOGOLELE	Selo
477	SD NEGERI 2 SAMIRAN	Selo
478	SD NEGERI 3 JRAKAH	Selo
479	SD NEGERI 4 JRAKAH	Selo
480	SD NEGERI 1 SIMO	Simo
481	SD NEGERI PUTRI	Simo
482	SD NEGERI 2 SIMO	Simo
483	SD NEGERI 1 KEDUNGLINGKONG	Simo
484	SD NEGERI GUNUNG	Simo
485	SD NEGERI BLAGUNG	Simo
486	SD NEGERI 1 PENTUR	Simo
487	SD NEGERI 1 TALAKBROTO	Simo
488	SD NEGERI TETER	Simo
489	SD NEGERI TEMON	Simo
490	SD NEGERI WATES	Simo
491	SD NEGERI 1 SUMBER	Simo
492	SD NEGERI 1 TEMPURAN	Simo
493	SD NEGERI SUCEN	Simo
494	SD NEGERI JATEN	Simo
495	SD NEGERI CONGOLWETAN	Simo
496	SD NEGERI REJOSARI	Simo
497	SD NEGERI LEMAHBANG	Simo
498	SD NEGERI NGRANDU	Simo



NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
499	SD NEGERI KRAGILAN	Simo
500	SD NEGERI 2 TALAKBROTO	Simo
501	SD NEGERI 2 PELEM	Simo
502	SD NEGERI 2 KEDUNGLENGKONG	Simo
503	SD NEGERI 2 WALEN	Simo
504	SD NEGERI 2 SUMBER	Simo
505	SD NEGERI 3 GUNUNG	Simo
506	SD NEGERI 3 PELEM	Simo
507	SD NEGERI 2 PENTUR	Simo
508	SD NEGERI RANDUSARI	Teras
509	SD NEGERI CEMORO	Teras
510	SD NEGERI MOJOLEGI	Teras
511	SD NEGERI BALANGAN	Teras
512	SD NEGERI 1 TERAS	Teras
513	SD NEGERI 2 TERAS	Teras
514	SD NEGERI BANJARSARI	Teras
515	SD NEGERI BARENGAN	Teras
516	SD NEGERI 2 SALAKAN	Teras
517	SD NEGERI 1 BANGSALAN	Teras
518	SD NEGERI 2 BANGSALAN	Teras
519	SD NEGERI 1 SUDIMORO	Teras
520	SD NEGERI 2 SUDIMORO	Teras
521	SD NEGERI 1 NEPEN	Teras
522	SD NEGERI 2 NEPEN	Teras
523	SD NEGERI 1 KOPEN	Teras
524	SD NEGERI 2 KOPEN	Teras
525	SD NEGERI KADIRESO	Teras
526	SD NEGERI DOPLANG	Teras
527	SD NEGERI TAWENGAN	Teras
528	SD NEGERI 1 GUMUKREJO	Teras
529	SD NEGERI 2 GUMUKREJO	Teras
530	SD NEGERI 1 KRASAK	Teras
531	SD NEGERI 2 TAWANGSARI	Teras
532	SD NEGERI NGEMPLAK	Teras
533	SD NEGERI 1 WONOSEGORO	Wonosegoro
534	SD NEGERI 2 WONOSEGORO	Wonosegoro
535	SD NEGERI 1 MONGKRONG	Wonosegoro
536	SD NEGERI 2 MONGKRONG	Wonosegoro
537	SD NEGERI 1 REPAKING	Wonosegoro
538	SD NEGERI 2 REPAKING	Wonosegoro
539	SD NEGERI 1 BENGLE	Wonosegoro
540	SD NEGERI KETOYAN	Wonosegoro
541	SD NEGERI 1 BANYUSRI	Wonosegoro
542	SD NEGERI 1 KALINANAS	Wonosegoro
543	SD NEGERI BANDUNG	Wonosegoro
544	SD NEGERI GARANGAN	Wonosegoro
545	SD NEGERI 1 NGABLAH	Wonosegoro
546	SD NEGERI 1 BOLO	Wonosegoro
547	SD NEGERI BERCAK	Wonosegoro
548	SD NEGERI 1 GILIREJO	Wonosegoro
549	SD NEGERI 1 KEDUNGPILANG	Wonosegoro



NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
550	SD NEGERI 1 BOJONG	Wonosegoro
551	SD NEGERI 1 GOSONO	Wonosegoro
552	SD NEGERI 1 GUNUNGSARI	Wonosegoro
553	SD NEGERI 1 JATILAWANG	Wonosegoro
554	SD NEGERI SEWORAN	Wonosegoro
555	SD NEGERI 2 KALINANAS	Wonosegoro
556	SD NEGERI 2 BOJONG	Wonosegoro
557	SD NEGERI 2 GUNUNGSARI	Wonosegoro
558	SD NEGERI 2 BOLO	Wonosegoro
559	SD NEGERI 3 REPAKING	Wonosegoro
560	SD NEGERI 2 BENGLE	Wonosegoro
561	SD NEGERI 2 BANYUSRI	Wonosegoro
562	SD NEGERI 2 NGABLAH	Wonosegoro
563	SD NEGERI 2 JATILAWANG	Wonosegoro

BUPATI BOYOLALI



SENO SAMODRO





PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIKIS  
PADA DINAS DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI

BAGAN STRUKTUR UPT KELAS A



BUPATI BOYOLALI ✓

LENO SAMODRO





LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR    TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIKIS  
PADA DINAS DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI

BAGAN STRUKTUR UPT KELAS B



BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Telaah diteliti Bagian Hukum Setda	Paraf
--	-------